PERUNDUNGAN TERHADAP SANTRI DALAM PERSPEKTIF PASAL 76C UU 35/2014 DAN HADIS RIWAYAT BUKHARI DAN MUSLIM

Windi Putri Oktapiani¹, Tajul Arifin²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : windputri@gmail.com¹, tajularifin64@uinsgd.ac.id²

ABSTRACT:

Bullying against Islamic boarding school students is a serious issue that requires attention within Islamic educational institutions. This article aims to analyze bullying against students from the perspective of Article 76C of Law No. 35/2014 concerning Child Protection and the hadiths of Bukhari and Muslim. Through literature review, this article outlines the concept of bullying, applicable sanctions, and efforts for prevention and handling. The analysis results show that bullying against students is a violation of children's rights that can be subject to criminal sanctions under Law No. 35/2014, and it also contradicts Islamic teachings that encourage respecting the dignity of fellow Muslims. Recommendations include strengthening implementation, providing training for caregivers and teachers, and developing educational programs to minimize bullying and create a more inclusive and safe educational environment for students. It is hoped that this article can provide a deeper understanding of the issue of bullying against students and contribute to efforts to create a better educational environment, especially in Islamic boarding schools.

Key words: *Bullying; violence; santri; Islamic boarding school.*

ABSTRAK:

Perundungan terhadap santri merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dalam lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perundungan terhadap santri dalam perspektif Pasal 76C UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui kajian literatur, artikel ini menguraikan konsep perundungan, sanksi yang berlaku, serta upaya penanganan dan pencegahannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa perundungan terhadap santri merupakan pelanggaran hak anak yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU 35/2014, dan juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk menjaga martabat sesama muslim. Rekomendasi termasuk penguatan implementasi, pelatihan bagi pengasuh dan guru, serta pengembangan program pendidikan untuk meminimalisir perundungan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan aman bagi santri. Diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu perundungan terhadap santri dan memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang lebih baik, terutama di lingkungan pesantren.

Kata kunci : Kekerasan; Perundungan; Santri; Pesantren.

A. PENDAHULUAN

Perundungan (*bullying*) telah menjadi perhatian serius baik dari kalangan akademisi maupun praktisi pendidikan. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk perilaku negatif yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain yang berada dalam posisi yang lebih lemah atau rentan, seperti santri. Santri, sebagai individu yang menuntut ilmu agama di pesantren atau lembaga pendidikan Islam lainnya, seharusnya merasakan lingkungan yang aman, terbuka, dan mendukung untuk proses pembelajaran mereka. Namun, realitasnya, perundungan terhadap santri masih menjadi isu yang relevan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab, dampak, dan strategi pencegahan perundungan terhadap santri. Temuan dari penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial di pesantren, dinamika kekuasaan antara sesama santri, serta kurangnya pemahaman akan hak-hak santri dapat menjadi

faktor-faktor yang memperkuat perilaku perundungan. Perundungan terhadap santri juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental, kepercayaan diri, dan prestasi akademik mereka.

Namun, dalam hukum Indonesia, penanganan perundungan terhadap santri belum sepenuhnya tersurat dengan jelas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) memberikan landasan hukum perlindungan bagi anak-anak, termasuk santri. Namun, Pasal 76C UU tersebut perlu dieksplorasi lebih lanjut mengenai relevansinya dalam mengatasi perundungan terhadap santri. Di samping itu, pengetahuan dari perspektif keagamaan juga penting untuk dipertimbangkan. Hadis-hadis dari Riwayat Bukhari dan Muslim, sebagai sumber hukum Islam yang dihormati, dapat memberikan panduan etika dan norma yang relevan dalam menangani perundungan.

Namun, penanganan perundungan terhadap santri masih merupakan tantangan yang kompleks dalam kebijakan hukum di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) memberikan landasan hukum perlindungan bagi anak-anak, termasuk santri, Pasal 76C UU tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengenai relevansinya dalam mengatasi perundungan terhadap santri.

Selain itu, pengetahuan dari perspektif keagamaan juga penting untuk dipertimbangkan. Hadis-hadis dari Riwayat Bukhari dan Muslim, sebagai sumber hukum Islam yang dihormati, dapat memberikan panduan etika dan norma yang relevan dalam menangani perundungan. Kajian ini tidak hanya memberikan pandangan hukum, tetapi juga nilai-nilai moral yang mendalam dalam menangani perundungan terhadap santri.

Dengan menggabungkan perspektif hukum dan keagamaan, diharapkan kita dapat mengembangkan strategi yang lebih solutif dalam menangani perundungan terhadap santri. Harapannya, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, terbuka, dan mendukung bagi seluruh santri di pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur yang sistematis dan terperinci. Metode kajian literatur dipilih karena memungkinkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang relevan, termasuk artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen hukum, serta sumber-sumber primer dan sekunder lainnya yang berkaitan dengan perundungan terhadap santri.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi dan seleksi sumber literatur yang paling relevan dengan topik yang dibahas. Proses ini melibatkan pencarian melalui basis data akademis, perpustakaan digital, situs web resmi pemerintah, dan sumber-sumber lain yang diakui secara ilmiah. Selanjutnya, informasi yang ditemukan dari sumber-sumber literatur tersebut dihimpun secara sistematis untuk memastikan keakuratan dan relevansinya dengan topik perundungan santri yang dibahas.

Setelah pengumpulan data, tahap berikutnya adalah analisis terhadap informasi yang ditemukan. Informasi dari sumber-sumber literatur tersebut dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola-pola, tren, dan temuan yang signifikan terkait perundungan terhadap santri. Proses analisis ini mencakup evaluasi terhadap argumen-argumen yang dikemukakan oleh penulis, identifikasi kelemahan atau kekuatan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta penyusunan yang sistematis dari temuan-temuan yang relevan.

Selanjutnya, data dan temuan dari analisis literatur tersebut digunakan untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang perundungan terhadap santri, perspektif hukum dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014), serta pandangan keagamaan dari hadits-hadits yang terdapat dalam Riwayat Bukhari dan Muslim. Integrasi antara pemahaman hukum dan keagamaan diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh dalam merumuskan rekomendasi dan implikasi

kebijakan yang lebih berdaya guna dalam menangani masalah perundungan terhadap santri.

C. KAJIAN TEORI/PUSTAKA

Istilah "*bullying*" atau perundungan digunakan karena dianggap dapat mencakup beragam fenomena yang muncul dalam berbagai konteks sosial. Selain itu, istilah ini seringkali disandingkan dengan "*harassment*," yang berasal dari kata dalam Bahasa Perancis kuno "*harer*" dan Bahasa Inggris kuno "*hergian*," yang menggambarkan usaha sengaja untuk mengganggu atau merusak kehidupan seseorang (Hidayati, 2012). Menurut Olweus yang dikutip oleh Murphy, *bullying* tidak hanya terjadi sekali, tetapi merupakan serangkaian perilaku yang berulang-ulang dan dilakukan secara sengaja oleh satu individu atau kelompok terhadap individu lainnya. Dalam hal ini, seorang anak dianggap menjadi korban *bullying* jika ia secara konsisten mengalami perilaku merugikan baik secara fisik maupun emosional dalam berbagai situasi (Murphy, 2009). Poin penting yang ditekankan adalah bahwa *bullying* bukanlah tindakan yang terjadi sekali saja, tetapi merupakan pola perilaku berulang yang berpotensi memberikan dampak jangka panjang pada korban. Oleh karena itu, istilah "*bullying*" mencakup berbagai jenis perilaku yang bertujuan untuk menyakiti atau merugikan individu lain, baik secara fisik maupun emosional, dan sering kali dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan atau dominasi atas korban.

Menurut Randall, tujuan dari perilaku *bullying* adalah menciptakan rasa tidak nyaman, baik secara fisik maupun emosional, pada korban. Pepper dan Craigh, yang dikutip dalam Maliki, menyatakan bahwa bentuk *bullying* berubah seiring dengan bertambahnya usia anak. Bentuk-bentuk *bullying* dapat terjadi di berbagai situasi, mulai dari interaksi di tempat bermain hingga di lingkungan tempat kerja, termasuk kekerasan seksual, penyerangan kelompok, kekerasan dalam hubungan asmara, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, hingga intimidasi di tempat kerja dan berbagai bentuk lainnya.

Nansel, dkk., juga dalam Maliki, menambahkan bahwa beberapa bentuk *bullying* meliputi tindakan fisik (seperti pukulan dan tendangan), verbal (dalam bentuk ejekan atau ancaman), serta tindakan psikologis (seperti menyebarkan rumor atau mengucilkan) yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau dominasi atas korban.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari *bullying* adalah menciptakan ketidaknyamanan baik secara fisik maupun emosional pada korban. Bentuknya dapat bervariasi, mulai dari interaksi fisik hingga penggunaan media sosial atau teknologi interaktif untuk menyebarkan ancaman atau informasi yang merugikan korban. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara *bullying* langsung, yang melibatkan ejekan dan kekerasan fisik, dengan *bullying* tidak langsung atau relasional, yang menggunakan media sosial atau teknologi untuk merugikan dan mempermalukan korban secara psikologis.

D. HASIL PENELITIAN

Perlindungan anak dari perundungan diatur dengan cakupan yang luas, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, verbal, psikologis, dan seksual. Pasal ini memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan anak, baik secara fisik maupun mental, merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, Pasal 76C memberikan fondasi yang kokoh bagi upaya-upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan kasus perundungan.

Pasal 76C dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperkuat landasan hukum yang mengatur hak setiap anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Dalam esensinya, pasal ini tidak hanya menetapkan perlindungan fisik anak, tetapi juga meliputi aspek-aspek psikologis

dan emosional. Tanggung jawab untuk mencegah dan menangani kasus perundungan ditempatkan pada berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu aspek yang penting dari Pasal 76C adalah kewajiban pelaporan tindakan kekerasan terhadap anak kepada pihak yang berwenang. Hal ini menempatkan tanggung jawab pada setiap individu yang mengetahui atau menyaksikan tindakan perundungan untuk memberikan laporan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, seperti kepolisian atau lembaga perlindungan anak. Oleh karena itu, kasus-kasus perundungan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan efisien, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang menjadi korban.

Di samping itu, Pasal 76C juga memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap pelaku perundungan. Pelaku perundungan anak dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban perundungan mendapatkan keadilan.

Pasal 76C UU 35/2014 tidak hanya menegaskan komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari tindakan perundungan, tetapi juga memberikan instrumen hukum yang kuat untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan mereka. Dalam hal perlindungan santri, pasal ini memiliki relevansi yang signifikan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi mereka di lingkungan pendidikan Islam.

Pasal tersebut menegaskan prinsip dasar bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, larangan tegas terhadap tindakan kekerasan terhadap anak menjadi pijakan utama dalam menegakkan perlindungan anak. Larangan ini tidak hanya mencakup tindakan kekerasan yang bersifat fisik, seperti pemukulan atau penamparan, tetapi juga mencakup aspek-aspek kekerasan yang bersifat verbal, psikologis, dan seksual.

Dalam hal perundungan, larangan ini memiliki implikasi yang sangat penting. Perundungan sering kali melibatkan berbagai bentuk kekerasan yang bersifat verbal dan psikologis, seperti ejekan, penghinaan, atau pengucilan sosial. Larangan ini tidak hanya melindungi anak dari kekerasan fisik, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap keamanan psikologis dan emosional anak.

Selain itu, larangan terhadap kekerasan terhadap anak juga menempatkan tanggung jawab moral dan hukum pada setiap individu untuk mencegah dan melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Ini mencakup tanggung jawab untuk tidak hanya menghindari melakukan kekerasan terhadap anak, tetapi juga untuk tidak membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam tindakan kekerasan terhadap anak.

Selain menguatkan larangan terhadap kekerasan terhadap anak, pasal ini juga memberikan landasan bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus perundungan. Setiap pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikejar dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ini memberikan perlindungan yang kuat bagi anak-anak dan menegaskan komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan mereka.

Oleh karena itu, Pasal tersebut bukan hanya sekadar aturan hukum, tetapi juga merupakan panggilan moral yang menegaskan pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Dengan menghormati dan mematuhi larangan tersebut, setiap individu turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Pasal 76C UU 35/2014 memiliki makna yang sangat penting bagi kalangan santri, mengingat pesantren atau lembaga pendidikan Islam seringkali menjadi tempat utama

bagi mereka untuk menimba ilmu agama dan pengembangan diri. Dalam lingkungan pendidikan seperti pesantren, di mana interaksi antar-santri dan antara santri dengan pengasuh sangat intens, risiko terjadinya perundungan juga dapat meningkat. Oleh karena itu, Pasal ini menjadi penting karena memberikan jaminan perlindungan bagi santri dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan.

Pasal tersebut tidak hanya mengakui hak anak-anak untuk dilindungi dari kekerasan, tetapi juga menempatkan tanggung jawab pada pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat secara keseluruhan untuk mencegah dan menangani kasus perundungan dengan serius. Ini menciptakan argumen yang kuat untuk mengatasi perundungan di lingkungan pendidikan, termasuk di pesantren.

Dengan mematuhi ketentuan Pasal tersebut, pesantren dapat memastikan bahwa lingkungan belajar yang mereka ciptakan aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan santri. Selain itu, pesantren juga dapat mengembangkan kebijakan dan program pencegahan perundungan yang efektif, serta menangani kasus-kasus perundungan dengan cepat dan tepat.

Relevansi Pasal ini juga melampaui aspek hukum, karena memunculkan kesadaran akan pentingnya membangun budaya peduli dan saling menghormati di antara santri. Oleh karena itu, penerapan Pasal ini di lingkungan pesantren tidak hanya melindungi hak-hak santri, tetapi juga membentuk karakter yang baik dan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental bagi generasi masa depan.

Pasal 76C dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu ketentuan yang menegaskan larangan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak. Dalam upaya menegakkan perlindungan tersebut, Undang-Undang tersebut juga memuat ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap larangan tersebut, yang diatur dalam Pasal 80. Oleh karena itu, jika ada individu atau pihak yang melanggar larangan melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76C, maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 80 UU 35/2014. Selanjutnya, kita akan menjelajahi isi dari Pasal 80 tersebut untuk lebih memahami sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar.

Pasal 80 UU 35/2014 memberikan landasan hukum yang tegas dan spesifik terkait sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran terhadap larangan melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76C. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan menegakkan keadilan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap anak.

Dalam Pasal 80 UU 35/2014, sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggaran terhadap Pasal 76C dibedakan berdasarkan tingkat keparahan perbuatan pelanggar. Misalnya, sanksi yang diberikan bagi pelaku yang melakukan kekerasan yang tidak mengakibatkan luka berat pada anak akan berbeda dengan sanksi bagi pelaku yang menyebabkan anak mengalami luka berat atau bahkan meninggal dunia.

Untuk pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak tanpa menyebabkan luka berat, Pasal 80 UU 35/2014 mengatur bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dengan rentang waktu maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72 juta. Sanksi ini bertujuan sebagai bentuk penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.

Namun, jika akibat dari tindakan kekerasan tersebut anak mengalami luka berat, Pasal 80 UU 35/2014 memberikan sanksi yang lebih berat. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara yang lebih lama, yaitu maksimal 5 tahun, dan/atau denda maksimal Rp100 juta. Sanksi yang lebih berat ini mencerminkan keparahan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya, jika tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan kematian anak, Pasal 80 UU 35/2014 menetapkan sanksi pidana yang paling berat.

Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp3 miliar. Ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian anak dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius dan harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang sepadan.

Selain itu, Pasal 80 UU 35/2014 juga mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dapat ditambah sepertiga jika pelaku adalah orang tua dari anak yang menjadi korban. Hal ini menunjukkan perlunya menegakkan tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak-anaknya dari segala bentuk kekerasan dan memberikan perlindungan ekstra bagi anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan.

Oleh karena itu, Pasal 80 UU 35/2014 bukan hanya menjadi instrumen hukum yang menegakkan keadilan bagi korban kekerasan anak, tetapi juga sebagai pengingat bagi seluruh masyarakat akan pentingnya menghormati hak-hak anak dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap mereka. Melalui penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Pasal 76C, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak-anak, serta memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari sudut pandang keagamaan, hadits riwayat Bukhari dan Muslim memberikan panduan etika yang kuat terkait dengan perlakuan terhadap sesama. Salah satu hadits tersebut menyatakan bahwa mencela seorang muslim adalah dosa besar, sementara memerangi mereka dianggap sebagai kekafiran. Dari sini, kita dapat memahami pentingnya menjaga martabat dan hak asasi sesama manusia, termasuk dalam lingkup pendidikan. Penegasan dalam hadits Riwayat Bukhari dan Muslim ini bunyinya:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Artinya:

“Mencela seorang muslim adalah kefasikan (dosa besar), dan memerangi mereka adalah kekafiran.”

(HR. Bukhari no. 48 dan Muslim no. 64)

Hadits yang disebutkan memiliki makna yang sangat luas dalam ajaran Islam. Dalam hadits tersebut, Rasulullah Muhammad ﷺ menyatakan bahwa mencela seorang muslim dianggap sebagai dosa besar atau kefasikan, sementara memerangi mereka dianggap sebagai kekafiran. Pesan yang terkandung dalam hadits ini mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang sangat kuat dalam Islam, yang menuntut penghormatan, kasih sayang, solidaritas di antara umat muslim, saling menghormati, mendukung, dan melindungi sesama muslim dari segala bentuk perlakuan negatif.

Pertama-tama, hadits ini menegaskan pentingnya menjaga martabat dan kehormatan sesama muslim. Mencela atau merendahkan seseorang dengan perkataan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam. Setiap muslim diwajibkan untuk menjaga lidahnya agar tidak melukai atau merendahkan orang lain, terutama sesama muslim.

Selain itu, hadits ini juga menegaskan bahaya memerangi sesama muslim. Rasulullah ﷺ dengan tegas menyatakan bahwa memerangi sesama muslim dianggap sebagai tindakan kekafiran, yang menunjukkan tingkat seriusnya tindakan tersebut dalam Islam. Ini menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan solidaritas umat muslim, serta menolak segala bentuk kekerasan atau permusuhan.

Dari segi ajaran agama, hadits ini menekankan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai kasih sayang, penghargaan, dan keadilan dalam hubungan sesama muslim. Mencela atau memerangi sesama muslim bukan hanya melanggar etika sosial, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip iman dalam Islam. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan untuk menghindari tindakan-tindakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal perundungan, hadits ini memberikan pedoman yang jelas tentang pentingnya menghindari perilaku negatif terhadap sesama muslim. Perundungan, baik

dalam bentuk verbal maupun fisik, bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, penghargaan, dan keadilan terhadap sesama muslim.

Lebih dari sekadar larangan, hadits ini juga mengajarkan pentingnya membangun hubungan yang baik dan harmonis dalam komunitas muslim. Menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan mendukung merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim untuk menjaga persatuan dan kebersamaan umat. Hadits ini juga mengingatkan kita untuk selalu berusaha menjaga hubungan yang baik dengan sesama muslim, serta menghindari segala bentuk perilaku yang merugikan atau merendahkan orang lain, terutama dalam konteks perundungan.

Oleh karena itu, hadits ini tidak hanya memberikan ajaran moral dan etika bagi umat Islam, tetapi juga relevan dalam konteks sosial dan pendidikan. Penerapan nilai-nilai dalam hadits ini dapat menjadi landasan dalam mencegah dan mengatasi perundungan, serta membangun lingkungan yang aman dan saling mendukung bagi seluruh individu dalam komunitas muslim, apalagi di lingkungan pesantren.

Kesamaan dalil antara Pasal 76C UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak dengan hadits yang menyatakan bahwa mencela seorang muslim adalah kefasikan (dosa besar), dan memerangi mereka adalah kekafiran, memperlihatkan landasan yang kuat untuk perlindungan individu dalam masyarakat. Keduanya, baik secara hukum maupun moral, menegaskan larangan terhadap perilaku yang merugikan atau merendahkan martabat individu. Pasal 76C UU 35/2014 secara khusus menegaskan larangan terhadap kekerasan terhadap anak, sementara hadits melarang perlakuan negatif terhadap sesama muslim secara umum. Meskipun target perlindungan keduanya berbeda, yaitu anak-anak dalam kasus Pasal 76C dan sesama muslim dalam kasus hadits, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kehormatan, martabat, dan kesejahteraan individu dalam masyarakat.

Perbedaan antara keduanya terletak pada lingkup perlindungan dan sanksi yang diberikan. Pasal 76C UU 35/2014 memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dan menetapkan sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Sementara itu, hadits memberikan panduan moral dan spiritual bagi umat Muslim tentang dosa besar dari perilaku merugikan sesama muslim, tanpa memberikan sanksi hukum yang konkret. Dalam hal ini, Pasal 76C UU 35/2014 memberikan aturan hukum yang diterapkan secara formal oleh negara, sementara hadits memberikan pedoman moral yang diterima oleh umat Muslim sebagai bagian dari ajaran agama mereka.

Selain itu, sanksi yang diberikan oleh kedua aturan ini juga berbeda. Pasal 76C UU 35/2014 menetapkan sanksi berupa pidana penjara dan denda bagi pelanggaran terhadap perlindungan anak. Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran, seperti dalam kasus luka berat atau kematian akibat kekerasan. Di sisi lain, hadits memberikan penekanan moral dan spiritual, tanpa memberikan sanksi hukum yang spesifik. Meskipun demikian, hadits mengingatkan umat Muslim akan konsekuensi dosa besar dari perilaku merugikan sesama muslim.

Kedua dalil ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hal perlindungan individu dan pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Meskipun berasal dari konteks yang berbeda, keduanya menegaskan pentingnya menghormati, melindungi, dan mendukung individu dalam masyarakat, serta menekankan bahwa tindakan merugikan atau merendahkan orang lain merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan hukum yang mendasar. Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kedua aturan ini, diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan saling menghormati bagi seluruh individu, khususnya santri di pondok pesantren.

Terakhir, penanganan dan pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan pesantren merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi pendidikan tentang nilai-nilai positif, pembentukan kebijakan

dan prosedur yang jelas, penguatan pengawasan, pengembangan program keterampilan sosial, pembentukan tim dukungan dan konseling, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kegiatan penyuluhan dan seminar edukasi, serta kampanye kesadaran dan edukasi. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara tegas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua santri. Langkah-langkah ini juga akan membantu membangun kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak dan martabat individu dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan di lingkungan pesantren.

E. KESIMPULAN

Perundungan terhadap santri merupakan isu serius yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Dari analisis terhadap Pasal 76C UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, disadari bahwa perundungan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk santri di lingkungan pesantren.

Selain itu, hasil analisis terhadap hadits riwayat Bukhari dan Muslim menggarisbawahi pentingnya menjaga martabat dan hak-hak sesama muslim. Larangan untuk mencela dan memerangi sesama muslim menegaskan bahwa tindakan perundungan merupakan perbuatan yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam.

Penguatan implementasi Pasal 76C UU 35/2014 dalam lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya merupakan hal penting yang dapat menjadi keharusan untuk upaya pencegahan kasus perundungan di pesantren. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan bagi para pengasuh dan guru mengenai pengenalan, penanganan, dan pencegahan perundungan. Selain itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pesantren, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi santri.

Selain upaya hukum, juga diperlukan program pendidikan dan pembinaan yang lebih intensif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional santri, sehingga mereka dapat lebih tangguh dalam menghadapi tekanan dan konflik di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan perundungan terhadap santri dapat diminimalisir dan lingkungan pendidikan Islam dapat menjadi tempat yang lebih aman, nyaman, dan berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Algristian, Hafid, Nur Azizah, Fifi Khoirul Fitriyah, Khamida Khamida, Nur Hidaayah, and Devy Yahya. "Pencegahan Perundungan Pencegahan Perundungan untuk Mendukung Zero Violence Education di Lingkungan Pondok Pesantren." In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat: Perguruan Tinggi Mengabdikan Menuju Desa Mandiri*, vol. 1, no. 1, pp. 209-217. Unusa Press, 2022.
- Andryawan, Andryawan, Cindy Laurencia, and Maria Phoebe Tjahja Putri. "Peran Guru Dalam Mencegah Dan Mengatasi Terjadinya Perundungan (Bullying) Di Lingkungan Sekolah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2837-2850.
- Ayunita, Putri. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bullying Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024).
- Fadilah, Nurul, Nisa Ariantini, and Sri Wahyu Ningsih. "Fenomena bullying di kawasan pondok pesantren." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo* 5, no. 1 (2023).
- Gunawan, Adi, Ach Rifai, Gatot Subroto, Adriana Pakendek, Win Yuli Wardani, and Sapto Wahyono. "Pencegahan Tindakan Kekerasan Dalam Pendidikan Pesantren." *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 104-111.

- Hamidah, Maziyatul. "Religiusitas dan perilaku bullying pada santri di pondok pesantren." *Psycho Holistic* 2, no. 1 (2020): 141-151.
- Hidayati, N. (2012). *Bullying pada anak: Analisis dan Solusi*. INSAN.
- Iskandar, Yusuf, and Yana Priyana. "KONSEP PEMBELAJARAN VAN GELDER DALAM PERENCANAAN PENANGANAN BULLYING SANTRI DI PESANTREN VAN GELDER'S LEARNING CONCEPTS IN PLANNING HANDLING STUDENTS'BULLYING AT ISLAMIC BOARDING SCHOOLS." *MOTIVA: JURNAL PSIKOLOGI* 6, no. 2 (2024): 183-187.
- Muadi, Muadi. "Faktor Risiko Perilaku Perundungan Psikologis pada Remaja Putri Di Pondok Pesantren Ar-Ridwan Kabupaten Cirebon." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 1, no. 3 (2023): 149-155.
- Murphy, A. (2009). *Character Education: Dealing with Bullying*. New York: Chelsea House Publisher.
- Nasution, Tasya Hariska, and Panggih Nur Adi. "Peran Sekolah dalam Mengatasi Terjadinya Tindak Bullying di Kalangan Pelajar-Santri." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 8, no. 1 (2023): 1-8.
- Putri, Emalia, Habib Ismail, and Agus Setiawan. "Analisis Problematika Bullying Perspektif UU No 35 Tahun 2014." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 1-9.
- Rahman, Imas Kania, Nesia Andriana, and Syahrozak Syahrozak. "Menelisik Fenomena Bullying di Pesantren." *Asatiza: Jurnal Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 156-167.
- Rahman, Ira Nurhidayah, Suasanti Suasanti, and Novi Yanti Pratiwi. "Efektivitas Psikoedukasi terhadap Peningkatan Pemahaman terkait Bullying dan Psychological Well Being di Pesantren Pondok Madinah." *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2023): 568-574.
- Ruslan, R. and Lubis, S.W., 2024. Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Wasatiyyah dalam Mencegah Perilaku Bullying di Kalangan Santriwati. *Tafhim Al-'Ilmi*, 15(02), pp.188-203.
- Saragih, Muhammad Rizki Dermawan. "MANAJEMEN PESANTREN DALAM MENGATASI PERUNDUNGAN DI PESANTREN KABUPATEN DELI SERDANG." PhD diss., State Islamic University of North Sumatra, 2023.
- Suzanna, Ella, Nursan Junita, and Syahrial Syahrial. "Manajemen Emosi Pada Remaja Dalam Mencegah Perilaku Bullying Di Pondok Pesantren Al-Muslimun Lhoksukon." *Gotong Royong: Jurnal Pengabdian, Pemberdayaan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 37-41.
- Ulum, Mokhammad Miptakhul. "Sirkulasi Sosiologis dan Psikologis dalam Fenomena Bullying di Pesantren." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10, no. 2 (2021): 191-204.
- Widamar, Anjang Wahyu, Michael Jornal Steven Pasaribu, Muhammad Reihan Novendra Muslim, and Muhammad Alvin Naf'an. "Persoalan Perundungan di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, no. 01 (2023).